

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang mempunyai tujuan melayani kebutuhan umum menurut perspektif perekonomian. Organisasi sektor publik memiliki tujuan yang berbeda dengan sektor swasta. Berdasarkan perspektif perekonomian, usaha dalam memproduksi pelayanan dan barang publik untuk pemenuhan hak dan kebutuhan publik akan selalu berhubungan aktivitas suatu entitas (Ulum, 2004).

Dewasa ini, perkembangan sektor publik di Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena seperti adanya tuntutan akuntabilitas yang menguat atas lembaga-lembaga publik di daerah hingga pusat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik atas kegagalan atau keberhasilan dari tujuan organisasi untuk meraih tujuan dan sasaran yang sebelumnya ditetapkan (Stanbury, 2003).

Bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah bersumber pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 17 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pemerintah daerah hingga pusat dengan maksud sebagai upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan catatan atas informasi keuangan maupun media

bagi sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah tersebut dan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat umum.

Sebuah laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas harus dapat disajikan oleh pemerintah guna mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Oleh karena itu, asas sesuai dengan kebutuhan pemakainya dan asas manfaat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mengandung unsur informasi. Pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterangkan bahwa kualitas laporan keuangan wajib mempunyai karakteristik kualitatif yang sebagaimana telah disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 antara lain relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disajikan instansi pemerintah antara lain, neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran.

Dari berbagai yang peneliti temukan ternyata masih banyak adanya fenomena yang menarik untuk diuji dan dianalisis lebih mendalam karena ditemukannya kelemahan di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, berikut ini adalah fenomena yang berhasil saya himpun dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kelemahan tersebut berupa kelemahan sistem dan struktur pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya tren peningkatan pada kelemahan studi setiap semesternya dari tahun 2009 yang justru memberikan kontribusi paling tinggi bagi buruknya

laporan keuangan pemerintah. Aktivitas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat, pencatatan persediaan yang tidak tertib hingga aset tetap yang belum diinventarisasi akan menyulitkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah..

Masalah utama di dalam laporan keuangan pemerintah daerah tentu berkaitan dengan aset tetap yang belum dilaporkan dan kepemilikannya yang tidak jelas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai syarat penyajian aset tetap memenuhi karakteristik pelaporan keuangan sehingga aset tetap benar-benar ada, lengkap dan seluruh transaksi aset tetap ada.

Kabupaten Pati yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan kurang lebih memiliki 51 SKPD, berdasarkan informasi yang penulis dapat, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2015. Kemudian untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan ditindak lanjuti paling lambat 2 bulan dengan rekomendasi seperti catatan aset yang ternyata diketahui bahwa pemerintah mempunyai hutang obat RSUD RAA Soewondo Pati. Hal tersebut dikarenakan SKPD Kabupaten Pati tidak menugaskan sumber daya manusia pada penataan aset yang benar-benar kompeten, sehingga menyebabkan opini audit di Kabupaten Pati memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (pasfmpati.com).

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya laporan keuangan pemerintah yang belum sesuai dengan peraturan, dan meningkatnya

penyelenggaraan pemerintah yang baik dituntut oleh masyarakat. Karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan audit laporan keuangan pemerintah. Hal ini juga mendorong penerapan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah hingga pusat.

Hal yang mungkin dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan keandalan, kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Karena pada dasarnya penerapan sebuah sistem akuntansi didasarkan pada penyusunan laporan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian prosedur dari proses mengumpulkan data, aktivitas pencatatan, aktivitas pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan daerah guna mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan menggunakan aplikasi komputer ataupun secara manual (Permendagri Nomer 59 Tahun 2007).

Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan harapan dapat mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas, namun yang menjadi masalah yaitu tidak semua masyarakat mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut manajemen pemerintah daerah, salah satu dasar penting untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomis secara efektif dan efisien memerlukan sebuah informasi akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah

sistem akuntansi keuangan daerah, sistem akuntansi tersebut dijalankan oleh bendaharawan dan bagian keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi dimungkinkan dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan suatu informasi keuangan daerah kepada publik dan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diatur kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah hingga pusat.

Kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis didapat dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan maupun penyampaian informasi. Teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan fundamental bagi organisasi sektor swasta maupun publik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dimasa mendatang, kemampuan perusahaan, dan penentuan daya saing (Lestari atau Zulaikha, 2007).

Teknologi informasi mencakup perangkat komputer dan perangkat lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi berfungsi lain seperti untuk penyimpanan dan pemrosesan informasi, juga penyebaran informasi melalui jaringan internet (Wilkinson *et al.*, 2000; Arfianti, 2011). Komputer merupakan alat yang dapat membantu manusia dan melipat gandakan kemampuan yang dimilikinya (Wahana Komputer, 2003).

Manfaat dari penggunaan teknologi informasi antara lain kemampuan *multiprocessing*, biaya pemrosesan yang lebih rendah, meminimalisir terjadinya kesalahan, penyimpanan data dalam jumlah besar, keakuratan perhitungan, dan kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan (Wahana Komputer, 2003). Akan tetapi, implementasi teknologi informasi menjadi mahal bila teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal penggunaannya (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Pemanfaatan yang kurang optimal itu diantaranya disebabkan oleh keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi informasi, dan hal-hal yang terkait penggunaan *hardware* dan *software*. Berbagai kendala tersebut memungkinkan mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bukti empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan data akan memberikan banyak keunggulan. Seperti keakuratan/ketepatan hasil dan penggunaannya yang multiguna sekaligus *multiprocessing*. Kesalahan yang terjadi akan berkurang dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Botutihe (2013) pada pemerintah kota Gorontalo bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adanya perbedaan hasil penelitian dan masih sedikitnya penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Namun berbeda pada penelitian sebelumnya penelitian ini ada penambahan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi karena telah banyak diketahui bahwa manfaat dari teknologi informasi diantaranya keakuratan perhitungan, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, kemampuan *multiprocessing*, penyimpanan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dengan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi informasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan dapat menyampaikan suatu informasi keuangan daerah kepada publik dengan baik. Perbedaan lain dalam penelitian ini objek penelitian, penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Pati, sedangkan pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Gorontalo. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**”.

1.2. Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah mempunyai fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah menggambarkan keadaan keuangan pemerintah dan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan bagi daerah. Sangat pentingnya nilai akuntabilitas dalam mewujudkan *good government* mengharuskan laporan keuangan diaudit secara profesional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bukti secara empiris tentang :

- 1) Menguji atau menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Menguji atau menganalisis manfaat teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan daerah sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dalam aplikasi dilapangan. Dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian dengan tema yang sama dimasa yang akan datang.

- 2) Secara Praktis

- a) Pemerintah Pati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi dan pemanfaatan teknologi

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat memberikan informasi khusus kepada pihak yang bersangkutan dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- b) Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.